

**SEKURITISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN
JOKO WIDODO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**SUTINI KHODIJAH
07041181722047**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
“SEKURITISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO”

Skripsi
Oleh :
Sutini Khodijah
07041181722047

Pembimbing I

1. Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003




Pembimbing II

2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.S
NIP. NIP 199012062019032017



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770551220031210003

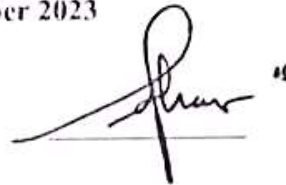
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
“SEKURITISASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MALAYSIA PADA ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO”

Skripsi
Oleh :
Sutini Khodijah
07041181722047

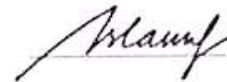
Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Desember 2023

Pembimbing :

1. Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 196504271989031003



2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.S
NIP. NIP 199012062019032017



Penguji :

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006



2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808



Indralaya 20 Desember 2023
Mengesahkan

Dekan

Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Sutini Khodijah
NIM : 07041181722047
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “**Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo**” adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Semua isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, Oktober 2023

Penulis,



Sutini Khodijah

NIM 07041181722047

Halaman Persembahan dan Motto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang)

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu dan jalan terbaik menurut-Nya. Shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, suami, serta almamater, teman-teman, rekan seperjuangan Hubungan Internasional Unsri dan berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan kritik, saran, nasihat, dan dukungannya kepada saya.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran”

(Q.s Al-Baqarah: 186)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah : 5-6)

Motto:

“Jadilah sukses agar orangtuamu bangga, musuhmu iri, dan orang yang menyakitimu menyesal”

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulunya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang sudah memiliki cukup syarat. Menurut BP2MI para Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak memilih bekerja di Malaysia karena dianggap jaraknya dekat dengan Indonesia dan merupakan serumpun. Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia khususnya di Malaysia dengan cara melakukan sekuritisasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan tentang Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sekuritisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo dan faktor mempengaruhi kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia masih tinggi meskipun Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia. Data yang disajikan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai buku, artikel, jurnal, surat kabar dan kasus-kasus terkait internet. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada kita tentang kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia masih tinggi faktor Eksternal seperti Pemerintah daerah, keamanan Badan, geografis, lembaga hukum dan masyarakat (dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya informasi dan Pendidikan).

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Sekuritisasi, BP2MI, Indonesia, Malaysia.

Indralaya, Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing 2

Pembimbing 1

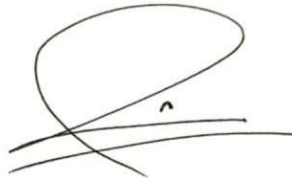


Dr. Azhar, S.H.,
M.Sc., LL.M., LL.D
NIP 196504271989031003



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
NIP 19901206201
9032017

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP 1977055122003121003

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) or what was previously called Indonesian Workers (TKI) are Indonesian citizens who work abroad who have sufficient requirements. According to BP2MI, Indonesian Migrant Workers (PMI) most often choose to work in Malaysia because it is considered close to Indonesia and is related. The Indonesian government protects Indonesian migrant workers, especially in Malaysia, by carrying out securitization between the Indonesian government and the Malaysian government in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono. This type of research is descriptive research, namely explaining the securitization of protection for Indonesian migrant workers in Malaysia in the era of President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo.

The research aims to find out how the securitization of protection for Indonesian migrant workers in Malaysia during the era of President Susilo Bambang Yudhoyono and President Joko Widodo and the factors influencing crime against Indonesian migrant workers is still high even though Indonesia has collaborated with Malaysia. The data presented is secondary data collected from various books, articles, journals, newspapers and internet-related cases. The results of this research show us that crimes against Indonesian migrant workers are still high due to external factors such as local government, agency security, geography, legal institutions and society (influenced by poverty, low information and education).

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Securitization, BP2MI, Indonesia, Malaysia.

Indralaya, Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing 2



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc

NIP 19901206201

9032017

Pembimbing 1

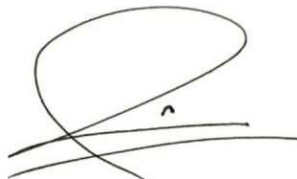


Dr. Azhar, S.H.,

M.Sc., LL.M., LL.D

NIP 196504271989031003

Disetujui oleh,
Ketua Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si

NIP 1977055122003121003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kerangka Teori	18
2.2 Alur Pemikiran.....	21
2.2 Argumen Utama.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Definisi Konsep	24
3.3 Fokus dan Jangkauan Penelitian.....	25
3.4 Unit Analisis	28
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Keabsahan Data	29
3.8 Teknik Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM	31
4.1 Sejarah Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.....	31
4.2 Alasan PMI bekerja di Malaysia.....	32
4.3 Permasalahan yang Kerap Terjadi Pada PMI di Malaysia.....	33
BAB V PEMBAHASAN.....	35
5.1 Securitizing Move.....	35
5.1.1 Aktor Sekuritisasi	35
5.1.2 Speech act dari aktor sekuritisasi.....	40
5.1.3 Referent Objek.....	43
5.1.4 Existensial Threat	44
5.2 Acceptance by audience....	47

5.2.1 Civil Society.....	47
5.2.2 Other Elite.....	52
5.3 Extradionary Measure... ..	53
5.3.1 Kebijakan satu pintu antara Indonesia dan Malaysia	54
5.3.2 Sistem monitoring PMI di Malaysia.....	55
5.3.3 Kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia	57
Kesimpulan dan Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	15
Tabel 1.2 Fokus penelitian.....	27
Tabel 1.3 Jadwal penelitian	31
Tabel 1.4 Speech act actor.....	39
Tabel 1.5 Pengaduan PMI.....	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Negara terbesar penempatan PMI di luar negeri.....	2
Grafik 2	Jenis permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia tahun 2014-2019.....	3
Grafik 3	Pengaduan PMI di Crisis Center.....	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	5
Gamabr 2.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Republik Indonesia, pada tahun 2020, terdapat 272,22 jiwa yang tinggal di sana. (Kemendagri.Go.id: dukcapil.2021) Permasalahan muncul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu permasalahan tersebut. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dan memadai untuk memenuhi lonjakan jumlah pekerja yang tersedia (Sihombing, Yaakob, & Safarudin, 2011).

Menurut Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), pekerja migran Indonesia (PMI) atau sebelumnya disebut dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang memiliki syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menerima upah. Semasa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, para aktivis pekerja migran Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 karena Undang-Undang tersebut dianggap disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan atau *agency-agency* untuk memeras pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dengan ditetapkan Undang-Undang Ini, maka penggunaan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga turut berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pada tahun 2018, menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, ada banyak negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara

di dunia. jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 283.640 jiwa. Dimana jumlah Pekerja Migran terbanyak yaitu berjumlah 90.671 jiwa di Malaysia. 72.373 jiwa di Taiwan dan 73.917 jiwa di Hongkong. Para PMI tersebut umumnya bekerja di sector informal sebagai pekerja domestic atau asisten rumah tangga. Jumlah Pekerja Migran Indonesia ini mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan hingga tahun 2019 saja jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 189.128 jiwa. Oleh sebab banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, dan sebagai salah satu negara dengan pengirim pekerja migran terbesar, upaya bagi perlindungan pekerja migran Indonesia sudah sepatutnya merupakan salah satu prioritas pemerintah RI.

Berikut ini adalah tabel negara Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia tahun 2014-2019.

Grafik 1 Negara Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia

No.	Negara	Jumlah Tenaga Kerja Luar Negeri
1	Malaysia	19.695
2	Taiwan	17.244
3	Hongkong	16.827
4	Singapore	4.139
5	Saudi Arabia	1.648

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI 2019

Terdapat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia dan terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: Pertama, yaitu tingkat kesiapan dan pengetahuan para calon pekerja terhadap kondisi lingkungan negara tujuan dan hak yang seharusnya mereka miliki; dan kedua, yaitu kondisi dan situasi lingkungan yang mendukung perlindungan bagi pekerja migran Indonesia tersebut. Seperti posisi tawar

diplomantik antara negara pengirim dengan negara penerima yang juga didukung atas situasi di kedua negara berlangsung kondusif.

Berikut ini adalah tabel jenis permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia.

Grafik 2 Jenis permasalahan yang dialami oleh PMI di Malaysia tahun 2014-2019

No	Jenis Permasalahan	2017	2019
1	Tidak dibayar gaji	390	660
2	Kekerasan fisik	66	34
3	Pelecehan seksual	10	11
4	Tidak sesuai penempatan kerja	137	124
5	Rekrutmen ilegal	59	46

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI 2019

Crisis Center mengalami peningkatan pengaduan PMI setiap tahunnya, menurut data yang dikumpulkan oleh BNP2TKI. Dari 1.294 total pengaduan di tahun 2014 menjadi 9.377 total pengaduan di tahun 2019, jumlah pengaduan PMI semakin bertambah. total pengaduan pada 2019, namun sedikit berkurang pada tahun 2017, yaitu sebanyak 4.349 pengaduan. Meskipun demikian, jumlah keseluruhan pengaduan PMI pada tahun 2019 adalah 4.779, dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. PMI mengajukan pengaduan baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, panggilan telepon, email, dan SMS. Jumlah pengaduan yang diterima *Crisis Center* dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 3 Jumlah Pengaduan PMI di Crisis Center

Tahun	Jumlah Pengaduan
2014	1294
2017	4349
2018	4770
2019	9377

Sumber: BNP2TKI 2019

Dengan melihat table grafik 3, dapat kita lihat bahwa Permasalahan PMI yang bekerja di Malayasia masih banyak mengalami permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan PMI tersebut dan melindungi PMI di Malaysia, Untuk mencegah aktivitas yang dapat membahayakan PMI, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah langkah untuk mengelola atau melestarikannya. Terkait dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga PMI melalui lembaga-lembaga terkait ketenagakerjaan, yang digunakan adalah pendekatan institusionalis, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan PMI, baik legal maupun tidak. Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker-trans) merupakan lembaga-lembaga tersebut. Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Malaysia dan berhasil mengelola perlindungan pekerja migran. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Hal tersebut terbukti pada kesepakatan bersama dalam beberapa perjanjian negara Indonesia dengan negara Malaysia, perjanjian tersebut adalah Kesepakatan Bersama Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang Tertuang dalam Penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan PMI dan Deklarasi ASEAN.



(Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Perdana Menteri Malaysia PM Malaysia Ismail Sabri (kiri) melakukan kunjungan di Istana Merdeka untuk menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia)

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

Dalam menyelesaikan masalah dan perlindungan PMI di Malaysia yaitu melalui pertemuan bilateral kedua Negara membahas perlindungan Nota Kesepahaman atau MoU yang mencakup Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, diterima oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau *one channel system* sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). Sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk kerjasama tersebut dan bagaimana implementasinya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan beberapa hal tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Sekuritisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo”.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu “bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo?”

2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai penelaah serta memahami dalam menganalisa tentang bagaimana kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo.

2.3 Manfaat Penelitian

2.3.1 Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini maka peneliti dapat membahas bagaimana bentuk kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo.

2.3.2 Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang sekuritisasi perlindungan pekerja migran bagi peneliti selanjutnya. Dan juga dapat menjadi acuan sebagai referensi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin. (2008). *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antara News. (2019). *Kemlu: Perlindungan Tki Jadi Prioritas Diplomasi Indonesia*. http://www.imq21.com/news/read/468273/20171219/162721/KEM_LU-PERLINDUNGAN-TKI-JADI-PRIORITAS-DIPLOMASIINDONESIA.html
diakses 30 Maret 2021.
- B, Murti. (2006). *Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Badan Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. (2017). Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode 1 Januari S.D 31 Desember 2017. [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-2017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_\(s.d_Oktober\).pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-11-2017_015327_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Oktober).pdf), diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Badan Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. (2018). *Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2018*. http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-2018_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-, diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
- Hadi, Andri. (2020). *Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016-2017*. http://digilib.uinsby.ac.id/35308/2/Zida%20Amalia_I72215023.pdf, diakses pada tanggal 30 maret 2021. Surabaya: Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kamajaya, Toni. (2020). *3 TKI Asal Sukabumi Disekap Dalam Pabrik di Malaysia*. <https://daerah.sindonews.com/read/898500/21/3-tki-asal-sukabumi-disekap-dalampabrik-di-malaysia-1409887646>, diakses pada 30 Maret 2021.
- Krisna, Didi. (1993). *Kamus politik internasional*. Jakarta : Grasindo
- Maksum, Ali. (2017). *Menyingkap Tabir Hubungan Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nakim, Hadromi. (2016). *Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri: Langkah langkah kebijakan yang dilakukan DEPLU dan perwakilan RI Luar Negeri dalam mendorong promosi dan perlindungan TKI*. Jakarta: Jurnal LIPI.
- Napitulu, Bani Praseto. (2018). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia*. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegera/article/viewFile/4785/8270>, diakses pada tanggal 1 Oktober.
- National Kompas. (2021). *Jokowi dan PM Malaysia Bahas MoU Perlindungan Pekerja Domestik asal RI*. nasional.kompas.com/read/2021/02/05/17450801/jokowi-dan-pm-

[malaysia-bahas-mou-perlindungan-pekerja-domestik-asal-ri?amp=1&page=2](#), diakses pada 31 Maret 2021.

Rachman, Gani. (2018). *Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga*. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=318761>, diakses pada tanggal 23 November.

Safitri, Galuh Endang. (2017). *Penerapan Perjanjian Persahabatan Antara Indonesia Dengan Filipina Dalam Proses Pemulangan Calon Jamaah Haji Indonesia Yang Hendak Berangkat Haji Secara Ilegal Dari Filipina (Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Treaty Of Friendship Between Republic Of The Philippines And The Republic Of Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Statistik Indonesia. (2015). *Statistical Yearbook of Indonesia*. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiF28nG6IPfAhWTXn0KHfJ8DWUQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fstatistik.go.id%2Ffiles%2Fuploads%2F47409%2Fstatistical_yearbook_of_indonesia_2015.pdf&usq=AOvVaw04raCIPYxk45VHQ2EBAHW, diakses pada tanggal 31 Maret 2021.

Tim Peneliti FISIP Universitas Airlangga & Litbang Politik Deplu. (1988). *Prospek Penyelesaian Masalah Kampuchea dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Asia Tenggara, Khususnya Indonesia*. Jakarta: Universitas Airlangga.

Wijanarko, Koento. (2015). *Kasus Nirmala Bonat dan Implikasinya Terhadap Pembentukan MoU Mengenai Penempatan TKI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia*. Malang: University of Muhammadiyah Malang.

Wijaya, Daya Negri. (2016). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science*. Malang: University of Muhammadiyah Malang.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/45673/presiden-jokowi-bangga-asean-perkuat-pembayaran-digital-lintas-negara/0/artikel_gpr

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/38035/bertemu-pm-malaysia-presiden-dorong-penyelesaian-mou-perlindungan-tki-dan-negosiasi-batas-negara/0/berita>

<https://bapeten.go.id/berita/kerjasama-teknologi-pemerintah-ri-dan-malaysia-134712>

<https://setkab.go.id/presiden-ri-dan-pm-malaysia-sepakati-perlindungan-tki-dan->

[pembukaan-perbatasan-negara/](#)

https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_malaysia_sepakati_mou_perlindungan_pekerja_migran_indonesia_di_malaysia

1B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965),

L Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967)

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/21420/9/Naskah%20Publikasi.pdf>- Schumpeter, 2002 :34
(KTI Aulia Ilma) Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tki di Malaysia
Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo

<https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2022/01/24/tantangan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia>

https://www.researchgate.net/publication/355372045_TENAGA_KERJA_INDONESIA_TKI_DAN_HUBUNGAN_INDONESIA-MALAYSIA_ERA_JOKOWI (ALI MAKSUM JURNAL)

<https://kumparan.com/kumparannews/era-baru-hubungan-indonesia-malaysia-di-bawah-kepemimpinan-mahathir-27431110790535572/2> (KUMPARAN NEWS)

<https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-titipkan-perlindungan-wni-di-malaysia-pada-pm-mahathir-27431110790535103/full>

<https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-dan-pm-malaysia-sepakati-perlindungan-tki-serta-pembukaan-perbatasan-negara?page=1>